

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah besar yang dihadapi negara Indonesia adalah kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan yang semakin meningkat.

Di negara Indonesia sendiri kemiskinan dan kesenjangan pendapatan warga negaranya terlihat perbedaan yang sangat mencolok antar warga negaranya. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan masyarakat dalam suatu daerah. Hal ini semakin terlihat dengan status kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemiskinan dan pendapatan menimbulkan berbagai perilaku negatif warga negaranya. (Tambunan, 2001:111).

Akan tetapi kesenjangan berada pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan adalah sebesar 0,42. kesenjangan pendapatan di Indonesia terlihat terutama antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selama 10 tahun terakhir kesenjangan pendapatan di Indonesia meningkat cukup pesat (Tambunan, 2003).

Koefisien gini, sebagai indikator standar kesenjangan pendapatan mulai meningkat dari 0,33 di tahun 2001 menjadi 0,41 di tahun 2012. Ini merupakan angka koefisien gini tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia.

Sedangkan kriteria Bank Dunia Tingkat Kesenjangan Distribusi Pendapatan Versi Bank dunia dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu, pertama 40% penduduk berpendapatan rendah (populasi miskin), kedua 40% penduduk berpendapatan menengah, dan ketiga 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Kesenjangan pendapatan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Agar pendapatan di Indonesia dapat meningkat, diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini

Penduduk miskin di Sumatera Utara hingga September 2012 lalu mencapai 1,4 juta jiwa. Meski setiap tahun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun tidak mampu menandingi laju pertumbuhan ekonomi Sumut. Secara rinci, kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumut rata-rata sebesar 6% pertahun, sedangkan penurunan angka kemiskinan hanya turun 5%. Artinya, elastisitas tingkat kemiskinan Sumut terhadap pertumbuhan ekonomi di bawah 1 angka Target mencapai penurunan kemiskinan tahun 2014 diangka 10% dan target MDG's (Millenium Development Goal's) sebesar 7,5% tahun 2015 mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, semua pihak harus saling bantu agar masalah kemiskinan menurun dari tahun ketahun. Di sisi lain, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumut juga dipengaruhi kinerja ekspor Sumut yang berkorelasi erat dengan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jumlah penduduk miskin, yakni penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan, di Sumatera Utara pada bulan Maret 2014 sebesar 1.499.700 orang (11,51 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 1.613.800 orang (12,55 persen), berarti jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara berkurang sebanyak 114.100 orang (1,04 persen). Selama periode Maret 2012 - Maret 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 40.400 orang (0,73 di daerah perkotaan berkurang 73.700 orang (1,40 persen).

Menurut Badan Pusat Statistik Pada sepeMBER 2015, garis kemiskinan Sumatra Utara secara total sebesar Rp. 366.137 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinanya Rp. 369,878 dan untuk serah perdesaan sebesar Rp. 352.637 per kapita perbulan. Sehingga dari bulan maret sampai september kemiskinan dan indeks keparahan menunjukkan kecendrungan meningkat.

**Tabel I.1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Dan Nasional Tahun 2004 – 2018**

Tahun	Jumlah	Persentase
	(RibU Jiwa)	(%)
1	2	3
Feb-04	1 972,7	16,74
Feb-07	1 883,9	15,84
Feb-08	1 889,4	15,89
Mar-09	1 800,1	14,93
Jul-10	1 840,2	14,68
Mei-11	1 979,7	15,66
Mar-12	1 768,4	13,9
Mar-13	1 613,8	12,55
Mar-14	1 499,7	11,51
Mar-15	1 490,9	11,31
Mar-16	1481,3	11,33
Mar-17	1 407,2	10,67
Sep-17	1 378,4	10,41
Mar-18	1 339,2	10,06
Sep-18	1 390,8	10,39
Sep-19	1 300,3	10, 21
Mar-19	1 380,7	10,12
Sep-20	1 370,3	10,1
Sep-20	1 390,5	9,82

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara dalam angka

Dengan status sebagai kota metropolitan yang memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau setara dengan 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara yang juga menempatkan Medan dalam 5 kota terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung dan Bekasi. Kota Medan memiliki total jumlah penduduk sekitar 2.122.804 jiwa (BPS Sumut, 2012) yang menunjukkan bahwa Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara administratif, kota Medan dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan. Karena jumlah penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap waktu. Hal ini bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau sering disebut PDRB atas dasar harga konstan setiap tahun. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di Kota Medan Tahun 2017-2020 dapat diuraikan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel I.2 Laju Pertumbuhan PDRB Di Kota Atas Dasar Harga**Konstan Tahun 2017-2021**

Tahun	Pertumbuhan PDRB
2017	7,79
2018	7,66
2019	5,36
2020	6,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kota Medan menurun setiap tahunnya dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 dengan angka pertumbuhan 7,79%. Angka pertumbuhan terkecil terjadi di tahun 2019 sebesar 5,36%. Laju pertumbuhan PDRB di Kota Medan yang menurun ini diikuti oleh penurunan jumlah KK miskin secara signifikan dari tahun 2017-2020.

Kota Medan yang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Utara termasuk salah satu kota yang mempunyai persentase penduduk miskin yang relatif besar karena jumlahnya mencapai 212 300 jiwa atau sekitar 10,05 % dari jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2016. Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya kesenjangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya. Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi Kota Medan sehingga menyulitkan terwujudnya Kota Medan yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan.

Sebagian besar penduduk kota Medan bekerja di bidang perdagangan yang dapat kita lihat dari tingginya aktivitas perdagangan di setiap ruas jalan kota Medan. Kesenjangan distribusi pendapatan ini menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin melaju tinggi. Kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta akses terhadap kesehatan maupun pendidikan yang berkaitan dengan daya beli. Kemiskinan juga terkait dengan ketersediaan sumber daya alam dan pengetahuan yang dimiliki serta perilaku hidup masyarakat setempat. (Yoseph M. Laynurak 2008 88).

Melihat kondisi jumlah penduduk miskin di Kota Medan yang relatif masih besar, maka berbagai program dan kegiatan terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menekan jumlah kemiskinan. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tanpa mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut, maka kebijakan tersebut kurang efektif dan tepat pada sarannya. Oleh karena itu, salah satu upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui kajian faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Medan ditinjau dari aspek ekonomi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat diformulasikan sebuah model pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonometrika. Selanjutnya, model tersebut diharapkan mampu mensimulasikan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dan mampu digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada masa mendatang.

Bedasarkan alasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Pedagang Di Kelurahan Suka Maju Medan Johor"

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang permasalahan serta pengamatan yang terjadi. Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Adanya kesenjangan Distribusi Pendapatan pada pekerjaan Pedagang di kelurahan suka maju medan johor.
2. Belum adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan Distribusi pendapatan perdagangan.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta membatasi ruang lingkup permasalahan untuk menghasilkan uraian yang sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis kesenjangan Distribusi Pendapatan di kelurahan suka maju medan johor.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Pedagang di kelurahan suka maju medan johor?
- b. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan Distribusi Pendapatan Masyarakat di kelurahan suka maju medan johor?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisis kondisi kesenjangan Distribusi pendapatan masyarakat upaya berdagang di kelurahan suka maju medan johor
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan kesenjangan Distribusi Pendapatan di kelurahan suka maju medan johor

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah : Sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang akan dijalankan ke depannya terkait dengan masalah yang ada.
2. Bagi Mahasiswa : Sebagai bahan studi atau tambahan literatur bagi mahasiswa / Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan
3. Bagi Penulis : Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Sarjana Ekonomi dan juga aplikasi dari pengetahuan yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan.
4. Bagi Masyarakat : Untuk menambah wawasan bagi masyarakat luas

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian pendapatan

Pendapatan menurut sudut pandang ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang diperoleh seseorang dan dikonsumsi dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi pendapatan ini menyetujui kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan pada suatu badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode.

Sedangkan menurut Winardi (1992: 171) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan faktor-faktor produksi. Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil "penjualan"nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.

Bagi negara-negara berkembang, pembangunan dalam bidang ekonomi sedang giat-giatnya dilakukan yang tujuannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita. Masalah umum yang sering terjadi dalam proses pembangunan pada negara berkembang adalah harsat konsumsi ri masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari kenaikan pendapatan.

Menurut Nazier dan Fadel (2006:135) pendapatan adalah suatu pertumbuhan asset yang mengakibatkan bertambahnya owner equity, tetapi bukan karena penambahan modal dan dari pemiliknya dan bukan pula merupakan penambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya kewajiban atau liabilitas.

1. Pendapatan dari hasil pekerjaan seseorang adalah melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja mencari nafkah/membantu mencari menghasilkan barang dan jasa yang dikerjakan selama waktu tertentu berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah dan gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja atau karyawan hasil usaha berupa sewa, harga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang.
2. Pendapatan yang datanya dari milik sendiri yaitu orang yang melakukan kegiatan yang di hasilkan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Misalnya budaya tanaman bahan makanan pokok yaitu ubi kayu, jagung dan lain sebagainya.
3. Pendapatan Nasional, yaitu, nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam suatu tahun.

Pendapatan perkapita dapat diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka konsumsi yaitu yang dikeluarkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka Dalam hal ini pendapatan perkapita determinan potensi ekonomi yang penting selain luas negara serta penduduk suatu Negara.

Tinggi rendahnya pertumbuhan Gross National Product (GNP) satu negara dapat terlibat dengan rendahnya pertumbuhan pendapatan perkapita disuatu negara Pemerintah suatu negara terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan lapangan kerja yang memadai,

menggalakkan program kerja berenena dan terakhir transfer pemerintah kepada golongan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Menurut Sukimo (2006:47), pendapatan nasional dapat ditentukan dengan tiga cara, yaitu

1. Cara produksi nete, ouput/input dalam negeri dari barang-barang dan jasa-jasa yang produksi oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu Negara. Total output tidak mencakup nilai barang-barang dan jasa-jasayang diimpor. Mendapatkan produk nasional bruto, produk domestik bruto harus ditambah dengan pendapatan bersih yang diterima dari luar negeri.
2. Cara pendapatan, total pendapatan yang diterima penduduk suatau Negara sebagai balas jasa dari produksi barang dan jasa sedang berlangsung. Pendapatan ini disebut pendapatan faktor, sebab ditambahkan pada faktor-faktor produksi, dan pembayaran transfer (transfer payment)tidak dimasukan dalam perhitungan, seperti tunjangan sakit, tunjangan pengangguran dimana tidak ada barang atau jasa diterima sebagai imbalan
3. Cara pengeluaran, totalpengeluaran dosmestik oleh penduduk suatu Negara pada konsumen dan investasi barang-barang. Hal ini mencakup pengeluaran pada barang dab jasa jadi (tidak termasuk barang atau jasa setengah jadi) dan termasuk harang-barang yang tidak terjual dan yang ditambahkan padapersediaan (investasi persediaan).

Bagi rumah tangga perdesaan yang hanya menguasain faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di tingkat upah yang diterima. Kedua faktor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja perdesaan. Kesempatan kerja di perdesaan ditentukan oleh

pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Di sektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi

Pendapatan rumah tangga pertanian ditentukan oleh tingkat upah sebagai penerimaan faktor produksi tenaga kerja. Nilai sewa tanah sebagai penerimaan dari penguasaan asset produktif lahan pertanian. Dengan demikian tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan faktor produksi.

Menurut Malian dan Siregar (2000) pendapatan rumah petani pinggiran perkotaan juga bersumber dari tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan dalam usaha tani sendiri (on-farm), kegiatan pertanian di luar usaha tani (off-farm) dan kegiatan di luar sektor pertanian (on-farm). Untuk petani yang berada di pedesaan, pendapatan yang bersumber dari kegiatan non-farm dan off-farm umumnya mencapai lebih dari 90 persen.

2.2 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Distribusi pendapatan merupakan masalah yang menjadi perhatian di negara-negara sedang berkembang, banyak negara yang sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai menyadari

pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi banyak dirasakan orang tidak memberikan pemecahan masalah kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan pengangguran semua di daerah pedesaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan absolut di negara-negara sedang berkembang.

Adelman dan Morris dalam Arsyad (2004 226-227) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu :

- Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita
- Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
- Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
- Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
- Rendahnya mobilitas sosial

- Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
- Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang
- Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri, rumah tangga, dan lain-lainya

Distribusi pendapatan nasional pemerataan atau kesenjangan pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu Kesenjangan antar daerah, Kesenjangan antar sektor, Kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat.

Kesenjangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya kesenjangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari kesenjangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan solidaritas. Serta kesenjangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil. Masalah pendapatan tidak hanya dilihat dari jumlah saja tetapi bagaimana distribusi pendapatannya diterima oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi arah gejala distribusi pendapatan dan pengeluaran Indonesia; pertama, perolehan faktor produksi, dalam hal ini faktor yang terpenting adalah tanah. Kedua, perolehan

pekerjaan, yaitu perolehan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah yang cukup untuk memperoleh kesempatan kerja penuh. Ketiga, laju produksi perdesaan, dalam hal ini yang penting adalah produksi pertanian dan arah gejala harga yang diberikan kepada produk tersebut.

2.3 Kesenjangan dan Kemerataan Distribusi Pendapatan

Secara umum, para ekonomi membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (biasanya menggunakan metode Kurva Lorenz dan Koefisien Gini); dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi, yang di indikatornya berfokus kepada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (Todaro dan Smith, 2004).

Kesenjangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan rendah 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kesenjangan pendapatan dapat disebabkan oleh keberagaman faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu daerah/wilayah. Semakin banyak produksi yang dimiliki pendapatan yang semakin besar apabila suatu daerah memiliki ketidakmerataan pendapatan atau kesenjangan yang besar, maka akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan kesenjangan sosial. Dalam Indeks Atkinson ketidakmerataan terdapat perbedaan dalam mengukur pendapatan dan mengukur keterlibatan kerugian sosial dalam distribusi pendapatan yang tidak merata dalam pendapatan sama. Atkinson mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan pengurangan persentase pendapatan total yang dapat dijadikan

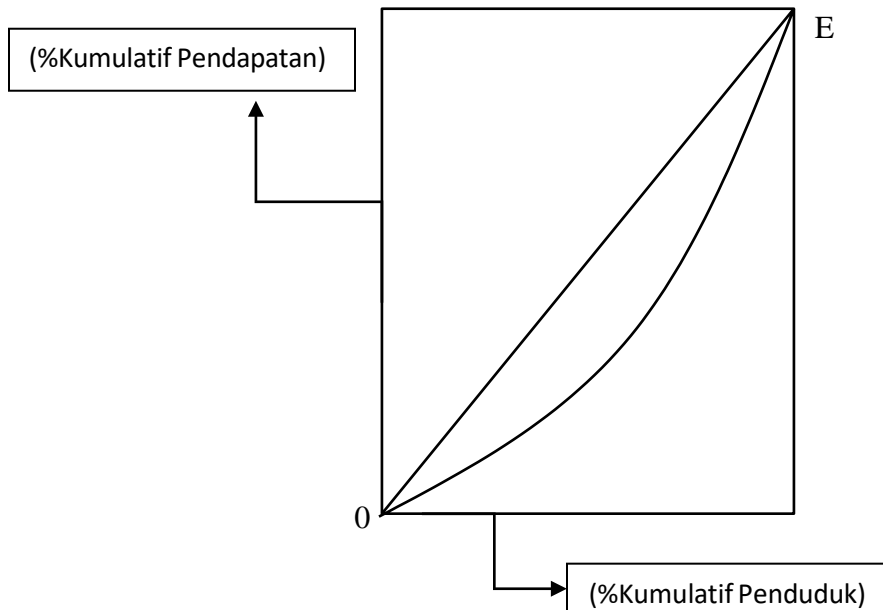
penompang tanpa mengurangi kesejahteraan sosial. Pada ketidakmerataan lebih, distribusi pendapatan sekarang, lebih mengurangi pendapatan total yang dapat menopang tanpa merugikan kesejahteraan sosial dengan distribusi pemerataan total yang baru.

2.4 Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan kesenjangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Ada jumlah alat atau media untuk mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang dinamakan Kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara prosentase permintaan pendapatan penduduk dengan prosentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun.

Pengukuran dengan gambar II.1 Kurva Lorenz sebagai berikut



Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut "garis pemerataan sempurna" Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusinya Pada gambar di atas, besarnya kesenjangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0) Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien gininya makin

mendekati suatu pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu.

Patokan Nilai Gini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Nilai Gini Ratio

Nilai Konfesien	Distribusi pendapatan
$x = 0$	Merata Sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat kesenjangan Rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat kesenjangan Sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat kesenjangan Tinggi
$x = 1$	kesenjangan sempurna

Data yang diperlukan dalam perhitungan Gini Ratio:

- Jumlah rumah tangga atau penduduk
- Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah di kelompokkan menurut kelasnya.

2.5 Faktor-faktor Penyebab kesenjangan

Sudah cukup banyak studi yang menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antar provinsi atau wilayah di Indonesia. Diantaranya dari Esmara (1975). Sediono dan Igusa (1992), Azis (1989), Hill dan Wiliams (1989),

Sondakh (1994), dan Safrizal (1997.2000) Namun menurut Sjafrizal (2012) Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu

- *Perbedaan kandungan sumber daya alam*
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi hingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
- *Perbedaan kondisi demografis*
Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktifitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
- *Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa*
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah akan

cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

- *Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah*

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

- *Alokasi dana pembangunan antar wilayah*

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Sedangkan menurut Adelman dan Morris dalam Arsyad (2010:24) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita;
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan

harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;

5. Rendahnya mobilitas social;
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industry rumah tangga, dan lain-lain.

2.6 Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. Kegiatan perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara. Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancarkan penyaluran dan pengadaan bahan baku.

Menurut Damsar, sebagaimana dikutip oleh Darman dalam jurnalnya mengemukakan bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan

tempat- tempat fasilitas umum, seperti terotoar, emperan toko dan pinggir-pinggir jalan umum. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha seperti kegiatan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pasar induk lambaro kelurahan suka maju. Ada tiga jenis pedagang kaki lima, antara lain:

1. Pedagang menetap

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini konsumen harus mendatangi tempat dimana pedagang itu berada.

2. Pedagang semi menetap

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya dalam saat-saat tertentu saja. Pedagang ini biasanya berada pada acara-acara tertentu, seperti pada acara permainan sepakbola di Siliwangi biasanya pedagang itu berada di sana.

3. Pedagang keliling

Pedagang keliling adalah pedagang yang biasa mengejar konsumen, biasanya pedagang ini menggunakan gerobak kecil atau menggunakan tanggungan. Pedagang ini biasanya mempunyai volume dagang yang kecil.

Sedangkan menurut MenurutHidayat (2000), pedagang sebagian besar merupakan bagian daripada sektor informal walaupun terdapat beberapa pedagang yang tergolong dalam sektor formal. Oleh karena itu membicarakan tentang pedagang tidak bisa lepas dari pembicaraan terhadap sektor formal daninformal.

Sektor informal pada hakekatnya merupakan konsep ekonomi Sektor informal merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di Negara yang sedang berkembang, untuk mencari kesempatan kerja daripada mencari keuntungan. Sektor formal merupakan hasil dari suatu proses panjang sector informal yang semakin lama menjadi terbalik dari ciri-ciripada sektor informal itu sendiri, sebagai akibat dari sebuah proses yang cenderung membawa perubahan

yang signifikan. Selanjutnya secara sederhana sector formal, dapat diartikan sebagai sektor yang sudah memiliki sifat resmi dan legal, diakui Pemerintah dan bahkan mendapat pengawasan Pemerintah.

Menurut Todaro (2000: 351-352) ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktifitas-aktifitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana.
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal.
3. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah dari pada di sektor formal.
4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pension.
5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.
7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang.
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (slum area) dan permukiman liar (schelier) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Peneliti di Indonesia telah menghasilkan sembilan ciri pokok sektor formal yang bersifat kualitatif (Hidayat, 2000) yaitu kegiatan usahanya terorganisasi dengan baik, umumnya memiliki izin usaha atau terdaftar di Pemerintah, pola kegiatan teratur, kebijakan pemerintah dalam memacu usaha dapat dirasakan, unit usahanya bersifat tetap dan jarang pindah ke unit usaha yang lain, teknologi yang digunakan sudah maju, modal dan perputaran usaha relatif besar pendidikan yang dimiliki untuk menjalankan usaha sebagian besar bersifat besar, disamping modal sendiri, sumber modalnya juga didapatkan dari bantuan Pemerintah.

2.7 Penelitian sebelumnya

1. Joko Waluyo (2006), dengan judul jurnal " Hubungan antar Tingkat Distribusi Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi suatu study Lintas Negara." dengan hasil kesimpulan bahwa hubungan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan. Artinya setiap ada penurunan distribusi pendapatan, maka ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan distribusi pendapatan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kuznets yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, hubungan antara kesenjangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan. Hubungan negatif akan terjadi dalam jangka panjang.
2. Linggar Dewangga Putra (2011), dengan judul "Analisis Pengaruh kesenjangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah". Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, yaitu variabel indeks Gini dan Indeks Williamson. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.87 yang berarti variasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah bisa dijelaskan variabel independen, sedangkan sisanya 13% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

3. Firza Mahardikha Hakiki (2015), dengan judul "Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Perkotaan (khusus Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta)". Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden rumah tangga PNS, Pedagang, dan Buruh yang ada di Kelurahan Sumber, Nusukan, dan Kadapiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Metode analisis yang digunakan adalah Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kecamatan Banjarsari masih terdapat kesenjangan pendapatan yang tergolong sedang, kesenjangan tinggi berasal dari kelompok mata pencaharian pedagang senilai 0,471. Hal tersebut terjadi karena perbedaan dalam produk yang dijual dan permodalan pada setiap pedagang.
4. M. Raga Suwanda (2016), dengan judul "Anlisis kesenjangan Distribusi Pendapatan Masyarakat Prosuden Ikan Asin Di Kecamatan Medan Belawan". Hasil analisa deskriptif secara umum menunjukkan bahwa masi ada kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dikarenakan setiap peningkatan modal dan produksi maka akan diikuti pada peningkatan produsen. Dikarenakan untuk variabel produksi diperoleh koefisien regresi sebesar 282.51, dengan nilai senigfikansebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada tarafsignifikan 95% secara serempak ada pengaruh nyata tingkat modal dan produksi terhadap tingkat pendapatan masyarakat ikan asin di Medan Belawan.

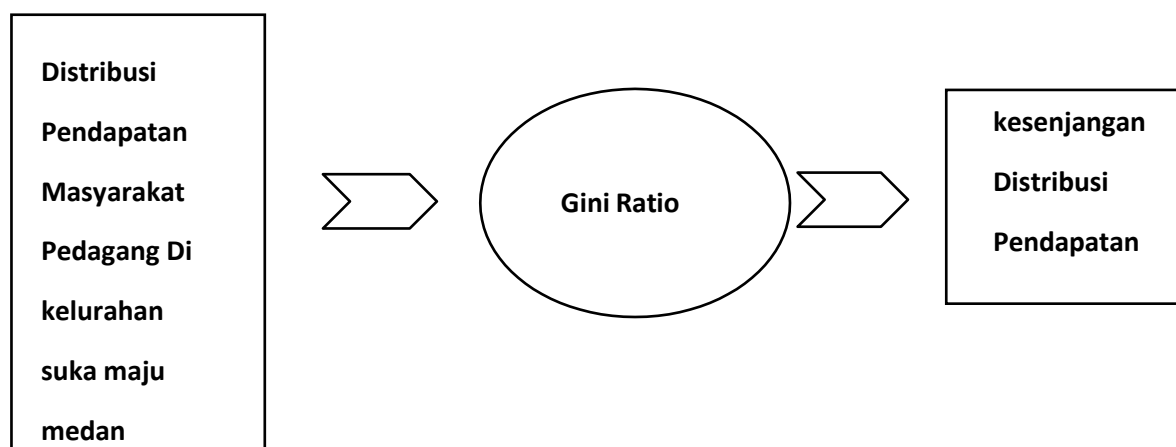
2.8 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah tidak terlepas dari masalah distribusi pendapatan masyarakatnya, karena dengan naiknya distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka serta penelitian -penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kesenjangan pendapatan dan alokasi pendistribusian pendapatan oleh pedagang

Dikelurahkan suka maju medan johor. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.2 Kerangka Konseptual



kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dihitung menggunakan Indeks Gini. Semakin kecil (mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusinya. Di lain pihak, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kiantimpang atau senjang.

2.9 Hipotesis

Margono (2004: 80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis) Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (deduced) dari teori yang telah ada.

Bedasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hopotetis penelitian adalah:

1. Terdapat kesenjangan Distribusi Pendapatan Masyarakat yang bekerja sebagai Pedagang di kelurahan suka maju medan johor.